

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MITIGASI
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Dimas Septian Galih Pramudya

NPP. 29.0788

Asdaf Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : dgalih24@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Semarang Regency is an area that is very prone to landslides because it is dominated by hilly areas. The impact of this landslide disaster caused material and non-material damage and losses that needed to be followed up, therefore there was a need for follow-up from the local government and BPBD Semarang Regency to reduce the risk of landslides. **Objective:** The purpose of this study is to describe the implementation of mitigation in landslide disaster management in Semarang Regency. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach, using primary and secondary data obtained from interviews, observations, and documentation. The focus of this research is on the implementation of landslide disaster mitigation which is studied with several effectiveness indicators according to Tangkilisan (2005) in order to examine the effectiveness of BPBD Semarang Regency in landslide disaster mitigation. **Results/Findings:** The result of this study is to explain that the implementation of landslide disaster mitigation carried out by BPBD Semarang Regency is quite effective based on its duties and functions. This is due to the lack of availability of human resources, lack of supporting resources, limited employees, and low levels of public awareness. **Conclusion:** There are several efforts to reduce the risk of landslides, including completing the availability of supporting resources (facilities and infrastructure), improving the quality of human resources, increasing the level of public awareness, synergizing tasks and functions between institutions involved in disaster management. So the conclusion obtained is that the Semarang Regency BPBD has attempted to implement a landslide disaster mitigation program in Semarang Regency but there is still much that needs to be improved.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Mitigation, Landslide, Semarang Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Semarang merupakan daerah yang sangat rawan terhadap terjadinya bencana tanah longsor karena di dominasi oleh daerah perbukitan. Dampak dari bencana tanah longsor ini menyebabkan kerusakan dan kerugian material maupun non material yang perlu di tindak lanjuti, oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah dan BPBD Kabupaten Semarang untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan mitigasi dalam penanggulangan bencana tanah longsor yang ada di Kabupaten Semarang. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, menggunakan data pr imer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara , observasi, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor yang dikaji dengan beberapa indikator efektivitas menurut Tangkilisan (2005) guna mengkaji keefektivan BPBD Kabupaten Semarang dalam mitigasi bencana tanah longsor. **Hasil/Temuan :** Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang sudah cukup efektif berdasarkan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, kurangnya sumber daya dukung, terbatasnya pegawai, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. **Kesimpulan :** Terdapat beberapa upaya dalam mengurangi risiko bencana tanah longsor diantaranya yaitu melengkapi ketersediaan sumber daya dukung (sarana dan prasarana) , meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat, mensinergikan tugas dan fungsi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah BPBD Kabupaten Semarang telah berupaya melaksanakan program mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Mitigasi, Tanah Longsor, Kabupaten Semarang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia disebut sebagai negara yang kaya dan mempunyai wilayah yang luas namun sangat berpotensi terjadi bencana, baik bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan lingkungan yang aman. Banyak Masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengelola bencana dengan efisien karena terjadinya suatu bencana tidak dapat diprediksi. Dalam hal ini risiko yang berdampak pada masyarakat yaitu kekurangan informasi mengenai tahapan penyuluhan dan pencegahan bencana. Menurut Rinaldi (2009), kesiapsiagaan bencana masyarakat Indonesia masih sangat minim, hal ini dibuktikan dari banyaknya korban jiwa serta harta benda dari setiap terjadinya bencana. Tindakan pemerintah untuk memperjelas tentang pentingnya upaya mitigasi bencana adalah dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan skala nasional serta membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan skala daerah. Kabupaten Semarang adalah sebuah wilayah di Indonesia yang secara geografis merupakan bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Secara garis besar Kabupaten Semarang adalah wilayah yang berpotensi bencana. Kondisi alam dan budaya masyarakatnya adalah faktor yang menyebabkan timbulnya ancaman bencana karena alam ataupun non alam. Beberapa wilayah Kabupaten Semarang memiliki kondisi geografis berupa bukit tinggi, daerah pegunungan vulkanik

dan terdapat daratan di bagian tengahnya. Hal ini memungkinkan terjadinya tanah longsor disebabkan oleh ketidakstabilan tanah yang umumnya oleh aktivitas manusia dan disertai oleh tingkat kerapatan vegetasi. Kabupaten Semarang merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat risiko longsor yang cukup tinggi. Setiap tahun pasti ada peningkatan dan penurunan kejadian bencana. Hal ini berdasarkan ringkasan kejadian bencana dari tahun 2020 sedikitnya 103 bencana longsor yang terjadi di sepanjang tahun tersebut. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa bencana tanah longsor ini sudah menjadi langganan bencana di wilayah Kabupaten Semarang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Semarang adalah wilayah yang rawan akan terjadinya bencana tanah longsor, dan setiap tahun pasti ada kenaikan dan penurunan kejadian bencana dan jumlahnya masih tergolong sangat tinggi. Salah satu faktornya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan bekal mitigasi yang diterima masyarakat Kabupaten Semarang tentang pentingnya upaya mitigasi bencana.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah yang pertama penelitian oleh Bayu Prasetyo yang berjudul “Implementasi Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah” (Bayu Prasetyo, 2017). Menemukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah Faktor yang menjadi penghambat dalam mitigasi bencana, kemudian untuk mengetahui tindakan nyata yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan mitigasi bencana, dan menggambarkan tentang implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan perannya. Kedua, penelitian oleh Sri Heryati yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana” (Sri Heryati, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui langkah pemerintah dalam menangani penanggulangan bencana, kemudian tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani permasalahan bencana yang ada di daerah tersebut, dan menjelaskan faktor penghambat penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Karo dalam mengatasi erupsi gunung Sinabung. Ketiga penelitian oleh Suci Nurhidayati dan Zikri Alhadi yang berjudul “Kendala Dalam Menanggulangi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Agam” (Suci Nurhidayati dan Zikri Alhadi, 2021). Menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa saja kendala dalam menanggulangi bencana longsor yang dilakukan BPBD Kabupaten Agam dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana pada wilayah Kabupaten Agam. Keempat, penelitian oleh Cucut Satria Barona dan Haryani yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Tanah Longsor Di Desa Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah” (Cucut Satria Barona dan Haryani, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah Menjelaskan partisipasi masyarakat Desa Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dalam mengatasi tanah longsor dan menjelaskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun suatu lembaga pemerintah dengan tujuan untuk mengupayakan mengurangi terjadinya risiko bencana.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni teori penelitian, lokasi penelitian dan kemudian dalam hal ini peneliti mengambil teori efektivitas menurut tangkilisan (2005), dan peneliti dalam melakukan penelitian membahas mengenai mitigasi bencana tanah longsor dengan menggunakan dimensi pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan tanggung jawab yaitu

mengenai mitigasi bencana berbasis kompetensi yang memiliki indikator penelitian yang berbeda dari penelitian yang ada sebelumnya dan lokasi penelitian yang peneliti ambil berlokasi di Kabupaten Semarang.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan mitigasi dalam penanggulangan bencana tanah longsor yang ada di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan agar mengetahui secara jelas dan akurat mengenai gejala-gejala yang timbul terhadap objek penelitian serta menarik kesimpulan secara umum berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lokasi pelaksanaan penelitian yang kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori yang cocok terhadap fokus dan penelitian. Pada awalnya peneliti mendapatkan data berdasarkan fakta empirik dan konkrit tentang kejadian dan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yaitu dengan menggambarkan sistem pemikiran yang bersifat umum. Dalam pendekatan penelitian ini nantinya peneliti akan mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai efektivitas pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, termasuk permasalahan yang ada dalam program tersebut.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Mitigasi Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Semarang

Pelaksanaan program penanggulangan bencana tanah longsor ini adalah upaya pemerintah dalam mengurangi dampak bencana tanah longsor. Untuk memastikan efektivitas program mitigasi bencana tanah longsor perlu dilakukan kajian mendalam berkenaan dengan pelaksanaannya, oleh sebab itu telaah terhadap efektivitas pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor menjadi hal penting sebagai upaya untuk memberi pertimbangan bagi pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 (empat) indikator dimensi tersebut sebagai instrumen yang menjadi parameter penilaian tingkat efektivitas pelaksanaan mitigasi dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang. Untuk menentukan capaian tingkat efektivitas pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor oleh BPBD Kabupaten Semarang, peneliti telah melakukan pengambilan data melalui metode yang telah ditentukan dan dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk mengukur tingkat capaian suatu lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan penanggulangan bencana tanah longsor, peneliti telah menyusun dengan 4 (empat) indikator dimensi sebagai parameter ukurnya.

1. Pencapaian Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu untuk segera membentuk, menyusun, dan menetapkan kebijakan program dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Beberapa indikator dalam mendukung dan menilai dari pencapaian tujuan yang dilakukan BPBD Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor antara lain yaitu:

1. Sebagai Alat Ukur Dalam Melakukan Evaluasi Diri dan Organisasi

Pencapaian target ini nantinya akan dijadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang sebagai wujud dalam mencapai tujuan yang dimana adanya peraturan yang legal tentang bagaimana mekanisme bentuk keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diharapkan semakin tercapainya sasaran raih capaian target yang sudah dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana suatu pelaksanaan tujuan organisasi dalam meraih target dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Semua upaya dalam pencapaian target mitigasi bencana telah dijadikan kebijakan dengan diurnya di dalam peraturan daerah, hal ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana merupakan sebuah prioritas yang tidak dapat dikesampingkan karena menyangkut keselamatan orang banyak.

2. Petunjuk Arah Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Organisasi

Pencapaian tujuan memerlukan pedoman dalam pelaksanaan kinerjanya, sesuai observasi dan wawancara yang dilakukan di BPBD Kabupaten Semarang pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Semarang merealisasikan visi dan misi penanggulangan bencana melalui program mitigasi yang dirasa belum efektif sehingga dibuatlah program kerja yang disusun berdasarkan strategi dan sasarannya. Tujuan strategi nantinya akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. Pencapaian tujuan dalam pelaksanaan mitigasi bencana juga adalah salah satu kegiatan yang menunjang visi misi dari Bupati Kabupaten Semarang dimana mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Semarang dan juga mitigasi bencana adalah salah satu kegiatan yang penting bagi masyarakat karena jika masyarakat kurang akan pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana terutama yang bertempat tinggal di sekitar wilayah yang rawan bencana akan merugikan dari banyak aspek terutama dari segi ekonomi.

2. Kemampuan Adaptasi

Beberapa kemampuan adaptasi telah teridentifikasi oleh peneliti melalui observasi dan penyelidikan di lapangan mengenai penyesuaian dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak pihak terkait. Beberapa indikator dalam mendukung dan menilai kemampuan adaptasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor antara lain yaitu:

1. Kemampuan Menyesuaikan Diri Organisasi Dengan Segala Bentuk Perubahan

Dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang, banyak yang terlibat dalam pelaksanaan mitigasi bencana dikarenakan ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberikan penyuluhan serta pelatihan kepada masyarakat agar siap dalam menghadapi bencana yang sifatnya bisa kapan saja menimpa. Langkah dan upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Semarang dalam memberikan pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor sangat di tekankan, terutama pihak BPBD Kabupaten Semarang juga harus dapat bekerja sama dengan pihak pihak seperti karang taruna, lurah, linmas, fkrb, basarnas, serta masyarakat. kemampuan menyesuaikan diri organisasi dengan segala bentuk perubahan sangatlah berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan mitigasi karena dibutuhkan penyesuaian dan terjalinya kerja sama antara BPBD dengan instansi terkait serta hubungan dengan masyarakat, hal ini ditekan dalam pembangunan kerjasama dan pembangunan relasi antarorganisasi di dalamnya.

2. Strategi dan Kemampuan Organisasi Dalam Menyelesaikan Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam melakukan aktifitas pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor akan menemukan lingkungan baru yang dimana saling bekerjasama dan berinteraksi antara satu dengan yang lainya mengingat titik rawan bencana tanah longsor di kabupaten Semarang tergolong tinggi. BPBD Kabupaten Semarang membuat strategi dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan program khususnya pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor sudah sesuai dengan prosedur, dengan langkah pemetaan hingga pelaksanaan sosialisasi adalah hal penting dalam pelaksanaannya dan dengan acuan pedoman Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini menjadi langkah dalam pelaksanaan mitigasi bencana.

3. Kepuasan Kerja

Keberhasilan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor dapat dinilai dari kepuasan kerjanya.

1. **Tanggapan Masyarakat Terhadap Pekerjaan dan Peran Dari Organisasi**
Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dengan tingkat kerawanan bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang pihak BPBD telah mengerahkan upaya dan usaha mengenai pencegahan bencana tanah longsor yang salah satunya adalah membangun kerjasama dengan pihak terkait penanggulangan bencana dan pembentukan Destana. BPBD Kabupaten Semarang juga mempunyai website dan akun sosial media yang memudahkan masyarakat Kabupaten Semarang dalam mengakses berita terkini mengenai bencana bencana yang ada serta kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang..
2. **Kecepatan dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Mitigasi Bencana Tanah Longsor**
Kecepatan dan ketepatan waktu pada pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor dalam penelitian ini peneliti mengamati bahwa dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan kecepatan dan ketepatan waktu dalam pemberian pelatihan pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor sangat tergantung terhadap data, apabila data tepat maka pemberian pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor akan di berikan secara cepat dan tepat kepada penerima penyuluhan mitigasi sebaliknya apabila datanya masih kurang dan tidak tepat maka pemberian pelatihan mitigasi tersebut akan terjadi terhambat.

Fokus	Program	Kegiatan
Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Semarang	Pemetaan rawan bencana	Pembuatan peta rawan bencana
		Pengelolaan logistik, bafer stock, dan peralatan SAR
		Siaga 24 jam
	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pembentukan DESTANA dan Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini
		Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
		Pengendalian keamanan lingkungan

	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Memfasilitasi penyusunan renkon tingkat desa dan kecamatan
	Pembangunan saluran drainase	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase jalan di daerah lereng
		Pemasangan EWS Tanah Longsor
		Pemasangan rambu jalur evakuasi
	Reboisasi	Penanaman pohon
Penyediaan Sarpras dan Yankes		

Sumber : BPBD Kabupaten Semarang, 2017-2022

Dapat disimpulkan bahwa jika program mitigasi bencana tanah longsor selesai tepat pada waktunya maka program ini dapat dinyatakan efektif. Secara urutan program mitigasi bencana tanah longsor sudah sesuai dengan penanganan yang ada di lapangan dan hal ini menjadi kepuasan BPBD Kabupaten Semarang dalam melakukan pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor.

3. Kesesuaian Tujuan Pelaksanaan

Tujuan dari fungsi pelaksanaan adalah merealisasikan rencana dan pengorganisasian yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini BPBD Kabupaten Semarang menggerakkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada dalam melakukan aktivitas tugas pekerjaan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor yang ada di Kabupaten Semarang. Dalam memberikan pelayanan pihak BPBD tidak membatasi wilayah dalam penanganan bencana, secara terbuka BPBD Kabupaten Semarang siap dalam membantu menanggulangi dan mencegah terjadinya bencana yang ada, dan pihak BPBD Kabupaten Semarang mengapresiasi terhadap masyarakat yang memberikan informasi pelaporan secara jelas tentang terjadinya bencana agar BPBD dapat segera menanganinya.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah salah satu hal penting dari penilaian keefektifan suatu pekerjaan, terlebih dalam pelaksanaan mitigasi dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang serta BNPB dan BPBD berupaya saling koordinasi dalam memberikan pelayanan pelatihan serta perlindungan terhadap masyarakat akan terjadinya bencana.

1. Respon dan Tanggapan Dari Pemerintah Dalam Memberikan Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Selain dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran dan tugas penting dalam memberikan tanggung jawab perlindungan kepada masyarakat. Upaya yang diberikan dan tanggung jawab yang diterima masyarakat adalah usaha dan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan bantuan terhadap warga yang terdampak bencana, dan memberikan perlindungan dan memberikan pelatihan agar masyarakat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana.

2. Memberikan Pelayanan Yang Prima Dengan Pedoman Visi dan Misi Organisasi

Dalam memberikan pelayanan yang prima khususnya pada pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan di BPBD Kabupaten Semarang sejauh ini sudah baik dan terprogram di karenakan visi dan misi dari Bupati Kabupaten Semarang untuk memberikan pelayanan yang prima dengan pedoman visi dan misi organisasi yaitu mewujudkan keamanan ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat Kabupaten Semarang. Indikator dimensi tanggung jawab dapat berpengaruh terhadap memberikan pelayanan yang prima, dengan adanya pedoman visi dan misi organisasi BPBD Kabupaten Semarang di antaranya adalah kesejahteraan masyarakat khususnya penyusunan dan penyelaraskan peraturan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana, dalam hal ini BPBD Kabupaten Semarang membuat program bekerja sama dengan dinas dan instansi terkait agar mempunyai tujuan yang sama.

3.2 Faktor yang Menghambat Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Semarang

1. Terbatasnya Sumber Daya Dukung

Sumber daya dukung adalah hal yang diprioritaskan dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil kajian observasi di lapangan pengelolaan sarana dan prasarana seperti alat peringatan dini EWS (Early Warning System) yang sudah terpasang di beberapa titik lokasi rawan terjadi bencana tanah longsor mengalami banyak kerusakan bahkan tidak semua titik rawan bencana tanah longsor terdapat EWS. Selain itu, langkah mitigasi struktural bencana tanah longsor dengan pembangunan talud dan drainase air sebagai infrastruktur penanggulangan erosi tanah hanya mampu diwujudkan di beberapa lokasi saja dikarenakan keterbatasan dari pendanaannya.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia/Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan, dapat dilihat bahwa anggota dan jumlah BPBD di Kabupaten Semarang saat ini sangatlah kurang apalagi jika melihat potensi bencana alam di Kabupaten Semarang yang cukup tinggi. Pelaksanaan dari program mitigasi non-struktural yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Semarang dalam membangun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, serta dalam pembentukan desa tangguh bencana atau sering disebut (DESTANA) juga masih kekurangan anggota jadi banyak yang merangkap tugas menjadi narasumber umum saat kegiatan sosialisasi dan pelatihan di masyarakat. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor adalah kurangnya kuantitas dari pegawai BPBD Kabupaten Semarang walaupun dari tingkat kompetensi dan tingkat keahlian memiliki kemampuan dalam penanganan bencana masing masing namun dilihat dari tingginya tingkat bencana yang ada di Kabupaten Semarang masih kurang optimal jika mengalami kekurangan sumber daya manusianya.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan longsor, menurut hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai daerah rawan bencana tanah longsor masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang tinggal di atas tanah yang rawan terjadinya tanah longsor. Pihak BPBD Kabupaten Semarang sebelumnya sering mensosialisasikan hal yang terkait upaya merelokasi warga yang bermukim di daerah rawan longsor, akan tetapi tidak sedikit yang menolak dengan berbagai alasan alasan yang diungkapkan. Rendahnya kesadaran masyarakat

akan pentingnya mitigasi bencana dikarenakan banyak masyarakat yang belum terdampak bencana. Program mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang didesain agar dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi dan pengawasan daerah rawan bencana yang dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

4. Kurangnya Koordinasi dengan Lembaga yang terkait

Hambatan lain yang ada pada BPBD yaitu terjadi kurangnya koordinasi serta komunikasi kepada Lembaga atau Dinas yang terkait yang mengakibatkan BPBD merasa kurang optimal dalam pelaksanaannya. Masalah koordinasi antar instansi atau dinas terkait masih sering mengalami hambatan dikarenakan perbedaan eselon antar pemimpin dinas terkait, dan harus melaporkan ke sekda mengenai hambatan dalam pelaksanaan ini dikarenakan sekda sebagai *ex-officio* dalam struktur organisasi yang ada.

3.3 Upaya - Upaya Yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang Dalam Mengatasi Hambatan

1. Melengkapi Ketersediaan Daya Dukung (Sarana dan Anggaran)

BPBD Kabupaten Semarang perlu untuk menambah pemasangan alat peringatan dini bencana (EWS) yang bersifat lebih modern namun dengan biaya yang murah dan kinerja yang lebih efektif. Seperti kita ketahui jumlah EWS yang dimiliki saat ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah titik rawan longsor yang ada Kabupaten Semarang, hal tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah dana anggaran yang dimiliki dan juga biaya perawatan yang sangat mahal. Selain itu langkah dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan juga harus menyeluruh ke semua wilayah daerah rawan longsor.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, maka BPBD Kabupaten Semarang mengusulkan kepada pemerintah daerah agar segera membuka lowongan tenaga kerja bagi calon anggota atau pegawai yang memiliki kompetensi untuk ditempatkan di BPBD Kabupaten Semarang. Selain itu, sebagai langkah upaya peningkatan kualitas kepada para pegawai BPBD yang masih minim keahlian, maka BPBD melakukan fasilitator dengan memberikan bekal keahlian yang dilakukan sebulan sekali. Pembekalan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian, pemahaman serta keahlian kompetensi para pegawai BPBD Kabupaten Semarang.

3. Meningkatkan Tingkat Kesadaran Masyarakat

BPBD Kabupaten Semarang terus berupaya mensosialisasikan kesadaran bencana di masyarakat tidak hanya dengan berbagai kegiatan formal, sosialisasi juga diupayakan melalui forum-forum internal. BPBD Kabupaten Semarang bekerjasama dengan pihak pihak terkait seperti dalam kegiatan pentas seni, wayangan, sekolah sekolah ataupun poster poster yang di sisipkan pesan-pesan terkait pentingnya kesadaran akan bencana.

4. Mensinergikan Tugas dan Fungsi Antar Lembaga yang Terlibat Dalam Penanggulangan Bencana

BPBD Kabupaten Semarang bekerja sama dan saling terkoordinasi secara baik dengan instansi pemerintah serta lembaga vertical yang kemudian menjalankan program mitigasi bencana dengan mensinergikan pada pelaksanaan di pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Kerentanan

ancaman bencana yang meningkat pada setiap tahunnya mewajibkan adanya perluasan jaringan kerja sama yang digunakan dalam pelaksanaan mitigasi bencana secara tepat dan serasi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam menanggulangi bencana tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan merancang strategi pengurangan dampak terjadinya bencana tanah longsor yang efektif dan efisien. Peneliti menemukan temuan penting pada penelitian ini, yaitu ada beberapa upaya yang seharusnya dapat memaksimalkan tugas dari BPBD Kabupaten Semarang akan tetapi belum terpenuhi secara keseluruhan. Kendala yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang yaitu kurangnya sumber daya dukung yang memadai, kurangnya sumber daya manusia yang mencukupi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana, kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait. Sama halnya dengan temuan Bayu Prasetyo, bahwa dalam pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD masih terdapat hambatan hambatan yang ada, dibuktikan dengan masih kurangnya tingkat sarana dan prasarana yang ada, faktor penghambat lainnya yaitu dari internal BPBD Kabupaten Banjarnegara itu sendiri dimana jumlah pegawai BPBD yang mempunyai keahlian dan kompetensi dibidang mitigasi bencana yang masih kurang. (Bayu Prasetyo,2017).

Sebagai bentuk nyata peran pemerintah dan pemerintah daerah, telah dibentuk BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah. Lembaga nondepartemen ini merupakan leading sector dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana. Posisi penting BPBD sebagai bentuk peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tentu harus disertai kemauan pemerintah daerah untuk mencukupi piranti yang dibutuhkan, baik berupa anggaran, SDM, maupun sarana-prasarana. Hal ini berkaca dari beberapa hasil penelitian yang mengkaji peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dimana diketahui bahwa faktor penghambat utama yang seringkali dihadapi oleh BPBD adalah permasalahan keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana-prasarana, serta lemahnya koordinasi antar sektor yang terlibat. (Sri heryati,2020).

Untuk menanggulangi bencana tanah longsor, setiap masing-masing stakeholder dengan BPBD melakukan kerjasama terkait penanggulangan bencana longsor, kendala yang dapat dikatakan berasal dari dalam organisasi BPBD Kabupaten Agam. untuk dapat mengatasi ataupun melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya, karena setiap peran dari masing-masing stakeholder sangat diperlukan dalam melakukan penanggulangan bencana longsor ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Agam yaitu terkendala pada sumber dana yang ada, peralatan dalam penanggulangan belum memadai dan juga masih minim,kapasitas anggota masih terbatas. (Suci Nurhidayati dan Zikri Alhadi, (2021).

Sosialisasi dari pemerintah yang menginformasikan tentang potensi dan resiko longsor juga belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat karena diadakan jarang sekali. Masyarakat sebagian sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan penanggulangan bencana tanah longsor. Namun, sebagian masyarakat masih kurang memperoleh pertukaran informasi seputar penanggulangan bencana mungkin karena kesibukan yang mereka miliki. Sosialisasi secara aktif telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah (BPBD) di beberapa lokasi tertentu. Diantaranya adalah di pusat-pusat wilayah yang rawan bencana serta di sekolah-sekolah. Hal ini bermaksud untuk dapat memberikan kesadaran secara dini kepada

masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Materi sosialisasi yang diberikan diantaranya adalah pengenalan mengenai bencana, upaya mitigasi bencana, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Kegiatan sosialisasi secara aktif dilakukan setiap bulan di lokasi yang berbeda-beda, baik itu di wilayah rawan bencana maupun di wilayah non rawan bencana. Sosialisasi yang dilakukan juga melibatkan beberapa stakeholders, diantaranya Kantor Camat dan Dinas Sosial, serta dibantu TNI dan Polri. Peran serta dari masyarakat juga selalu diharapkan oleh pemerintah setempat dalam membantu untuk menjadi agen yang mampu mengantisipasi tanah longsor minimal di desa tempat mereka tinggal sendiri. (Cucut Satria Barona dan Haryani, 2018)

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor yang berlokasi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sudah efektif dengan di uji menggunakan teori Efektivitas menurut Tangkilisan (2005), dengan indikator pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan tanggung jawab. Upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang dalam menutupi kekurangan terkait terbatasnya jumlah pegawai, maka BPBD Kabupaten Semarang secara periode memberikan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawainya, serta mengajak masyarakat yang terlibat menjadi relawan untuk ikut bergabung dalam penanganan bencana. Selain itu pihak BPBD juga menekankan sikap loyalitas dan integritas kerja yang dapat dilihat dari kinerja pegawainya. Melengkapi ketersediaan daya dukung seperti sarana dan prasarana dalam penanganan mitigasi bencana di BPBD Kabupaten Semarang. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemahaman pentingnya mitigasi bencana. Serta menjalin kerjasama yang harmonis dengan instansi instansi terkait dalam penanggulangan bencana tanah longsor khususnya pelaksanaan mitigasi.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran BPBD dalam mengurangi dampak risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang untuk menemukan hasil lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Barona, Cucut Satria dan Haryani. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Tanah Longsor Di Desa Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi.
BPBD Kabupaten Semarang 2017-2022.

- Heryati, Sri. 2020. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayati, Suci dan Zikri Alhadi. 2021. Kendala Dalam Menanggulangi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Agam. Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Publik. Hlm : 92-99.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
- Prasetyo, Bayu. 2020. Implementasi Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Laporan Akhir.
- Rinaldi. 2009. Kesiapan Menghadapi Bencana Pada Masyarakat Indonesia. Jurnal Penelitian Psikologi. 14 (1). hlm: 44-52.
- Sinambela, Marzuki, and Dkk. 2021. *Mitigasi Dan Manajemen Bencana*. 1st ed. ed. Ronal Watrianthos. Yayasan Kita Menulis.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.